



LAPORAN KINERJA

BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2021

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember Tahun 2021 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember. Kinerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember Tahun 2021.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember Tahun 2021.

Januari 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN JEMBER,

RATNO CAHYADI SEMBODO, SH

Pembina

NIP.19740827 200501 1 006

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN
C. PERJANJIAN KINERJA
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2021
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
BAB IV. PENUTUP.
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2021	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD	
Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2021 (jika ada)	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember tahun 2021 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember Tahun 2021.

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi :

“Terciptanya Situasi Kondisi Masyarakat Yang Aman, Tertib, Nyaman Dan Berkeadilan”

Capaian Kinerja sasaran tahun 2021 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1* : Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan mendapat predikat nilai **Baik** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 3 (lima) indikator sasaran, dengan capaian 3 (tiga) indikator dengan capaian tergolong **Baik**.
- Sasaran 2* : Meningkatnya pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum bagi aparatur pemerintah daerah dalam hubungan kedinasan dan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin mendapat predikat nilai **Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indikator sasaran, dengan capaian 2 (dua) indikator tergolong **Baik**.
- Sasaran 3* : Meningkatnya pemberian informasi hukum kepada masyarakat mendapat predikat nilai **Cukup**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 6 (enam) indikator sasaran, dengan capaian 3 (tiga) indikator tergolong **Baik**, 2 (dua) indikator tergolong **Cukup** dan 1 (satu) indikator tergolong **Kurang**.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 76% indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Baik** dan **Baik**, 18% indikator capaiannya **Cukup**, 4% capaian dalam kategori **Kurang** yang diakibatkan tidak dapat terlaksananya sub kegiatan tersebut karena terkendala situasi pandemi Covid 19 yang masih belum stabil.

Sedangkan realisasi belanja langsung sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.988.044.807 atau 90,33% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2021 antara lain:

1. Tidak terlaksananya sub kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah; dan
2. Kurang maksimalnya sub kegiatan Lomba Sadar Hukum dan Penyuluhan Hukum.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dengan langkah anggaran yang tidak terserap dialihkan ke kegiatan sosial demi membantu masyarakat terdampak pandemi Covid 19 melalui Refocusing anggaran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember.

Kinerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember tahun 2021

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan kinerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN JEMBER.

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 1 tahun 2021 sebagai berikut :

- (1) Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember merupakan unsur staf bagian dalam Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Jember.
- (2) Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum yang berkedudukan dibawah Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
- (3) Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dalam menyusun dan membentuk produk hukum daerah, melaksanakan kajian peraturan perundang-undangan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan penyelenggaraan pemerintah desa, melaksanakan telaah permasalahan hukum dan pelayanan hukum, mendokumentasikan dan mempublikasikan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan.
- (4) Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan dalam penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah;

- b. Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi Produk Hukum Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. Pengkajian Peraturan Perundang-undangan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - d. Penyiapan telaah bahan pertimbangan hukum dan pelayanan bantuan hukum kepada unsur Pemerintahan Daerah terkait permasalahan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintah Daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - e. Pelaksanaan pembinaan hukum maupun penyuluhan hukum kepada aparatur pemerintah daerah, perangkat desa dan masyarakat;
 - f. Pemberian pelayanan bantuan hukum kepada aparatur pemerintah daerah;
 - g. Pendampingan masyarakat miskin yang terkena masalah hukum baik secara litigasi dan non litigasi;
 - h. Penghimpunan peraturan perundang-undangan, publikasi dan dokumentasi serta sosialisasi produk hukum daerah;
 - i. Penyusunan program legislasi daerah;
 - j. Pelaksanaan fasilitasi produk hukum daerah; dan
 - k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- (5) Susunan organisasi Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember terdiri dari :
- a. Kepala Bagian;
 - b. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - d. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Visi dan Misi Kabupaten Jember

Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: “Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri “

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan;
dan
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.

2. Tujuan dan sasaran Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke 1 Yaitu Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislative, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu :

Tujuan1: Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tertib, nyaman dan berkeadilan.

Dengan Sasaran: 1. Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan;

2. Meningkatnya pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum bagi aparatur pemerintah daerah dalam hubungan kedinasan dan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin; dan

3. Meningkatnya pemberian informasi hukum kepada masyarakat.

4. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

➤ Tujuan 1, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah Penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah diarahkan pada produk-produk hukum daerah yang mendukung percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kebijakan yang diambil adalah Mengidentifikasi kebijakan daerah melalui inventarisasi peraturan perundang undangan agar dapat mewujudkan perencanaan hukum dan membentuk produk hukum dan membentuk produk hukum yang taat azas serta bertanggung jawab sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

➤ Tujuan 1, Sasaran 2

Strategi yang diambil adalah Pelayanan dan advokasi hukum kepada masyarakat miskin yang rentan terhadap masalah dan kasus hukum dengan memberikan pendampingan hukum secara gratis baik pada tingkat mediasi, penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan pokok perkara.

Kebijakan yang diambil adalah Pelayanan Bantuan Hukum, penyuluhan hukum dari sisi kenotarian maupun sisi peraturan perundang undangan yang berlaku serta pembinaan kelompok keluarga sadar hukum sebagai perwujudan, penerapan, penegakan dan edukasi hukum.

➤ Tujuan 1, Sasaran 3

Strategi yang diambil adalah Penyebarluasan informasi produk hukum daerah yang diarahkan pada produk-produk hukum daerah yang mendukung percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kebijakan yang diambil adalah Penyebarluasan informasi hukum dengan media cetak maupun elektronik serta pelaksanaan sosialisasi sebagai penunjang perangkat hukum dalam mendidik masyarakat sadar hukum melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2021.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

1. Sasaran dan Indikator Sasaran

Ada 3 (tiga) sasaran Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2021 yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Indikator Sasaran : 1. Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan;
2. Peraturan Bupati yang dihasilkan; dan
3. Jumlah Keputusan Bupati yang dihasilkan.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum bagi aparatur pemerintah daerah dalam hubungan kedinasan dan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin.

Indikator Sasaran : 1. Permasalahan Hukum terkait hubungan kedinasan yang dapat diselesaikan.
2. Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin serta Kelompok rentan.

3. Sasaran 3 : Meningkatnya pemberian informasi hukum kepada masyarakat.

Indikator Sasaran : 1. Lomba keluarga Sadar Hukum.
2. Penyuluhan Hukum.

3. Sosialisasi Produk Hukum.
4. Pengadaan Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
5. Pengelolaan Sistem Informasi JDIH.
6. Kajian dan laporan tentang permasalahan terkait Peraturan Perundang-undangan.

2. Program dan Indikator Program

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember Tahun 2021 sebanyak 1 (satu) program utama yaitu :

- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Indikator Program Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember selama Tahun 2021 sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :

a. Program Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memiliki kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum serta Sub Kegiatan antarlain :

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati yang telah ditetapkan.

2. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum.

Indikator Kegiatan (output/keluaran) : Tercapainya Jumlah Permasalahan Hukum dan Bantuan Hukum yang telah terselesaikan.

3. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.

Indikator Kegiatan (output/keluaran) : tercapainya Jumlah pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, lomba sadar hukum serta Jumlah produk hukum daerah yang telah terupload diwebsite JDIH Kabupaten Jember.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember Tahun 2021 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.	1. Tercapainya Peraturan Daerah yang dihasilkan.	90 %
		2. Tercapainya Peraturan Bupati yang dihasilkan.	90 %
		3. Tercapainya Keputusan Bupati yang dihasilkan.	100 %
2.	Meningkatnya program bantuan hukum yang berkaitan dengan Pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi pemerintah Kabupaten Jember dalam hubungan kedinasan dan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin serta kelompok rentan.	1. Tercapainya Permasalahan Hukum terkait hubungan kedinasan yang dapat diselesaikan	100 %
		2. Tercapainya Jumlah Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin serta Kelompok rentan.	100 %
3.	Meningkatnya pemberian informasi hukum kepada masyarakat.	1. Tercapainya keikutsertaan Lomba keluarga Sadar Hukum.	80 %
		2. Tercapainya Jumlah Penyuluhan Hukum.	80%
		3. Tercapainya Jumlah Sosialisasi Produk Hukum.	80 %
		4. Tercapainya Jumlah Pengadaan Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah.	90 %
		5. Tercapainya update Pengelolaan Sistem Informasi JDIH.	80 %
		6. Kajian dan laporan tentang permasalahan terkait Peraturan Perundang-undangan.	80 %

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi	Bidang Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.	Tercapainya Peraturan Daerah yang dihasilkan.	$\frac{8 \text{ Perda}}{10 \text{ Perda}} \times 100\%$	Kasubag Perundang-undangan	Bagian Hukum
	Tercapainya Peraturan Bupati yang dihasilkan.	$\frac{60 \text{ Perbup}}{60 \text{ Perbup}} \times 100\%$	Kasubag Perundang-undangan	Bagian Hukum
	Tercapainya Keputusan Bupati yang dihasilkan.	$\frac{500 \text{ SK}}{500 \text{ SK}} \times 100\%$	Kasubag Perundang-undangan	Bagian Hukum
Meningkatnya program bantuan hukum yang berkaitan dengan Pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi pemerintah Kabupaten Jember dalam hubungan kedinasan dan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin serta kelompok rentan.	Tercapainya Permasalahan Hukum terkait hubungan kedinasan yang dapat diselesaikan	$\frac{5 \text{ Perkara}}{5 \text{ Perkara}} \times 100\%$	Kasubag Bantuan Hukum	Bagian Hukum
	Tercapainya Jumlah Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin serta Kelompok rentan.	$\frac{100 \text{ Bantuan}}{100 \text{ Bantuan}} \times 100\%$	Kasubag Bantuan Hukum	Bagian Hukum
Meningkatnya pemberian informasi hukum kepada masyarakat.	Tercapainya keikutsertaan Lomba keluarga Sadar Hukum.	$\frac{3 \text{ latihan lomba}}{6 \text{ latihan lomba}} \times 100\%$	Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum	Bagian Hukum
	Tercapainya Jumlah Penyuluhan Hukum.	$\frac{3 \text{ Penyuluhan}}{6 \text{ Penyuluhan}} \times 100\%$	Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum	Bagian Hukum
	Tercapainya Jumlah Sosialisasi Produk Hukum.	$\frac{0 \text{ Sosialisasi}}{5 \text{ Sosialisasi}} \times 100\%$	Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum	Bagian Hukum
	Tercapainya Jumlah Pengadaan Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah.	$\frac{240 \text{ Buku}}{240 \text{ Buku}} \times 100\%$	Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum	Bagian Hukum
	Tercapainya update Pengelolaan Sistem Informasi JDIH.	$\frac{100 \text{ update dt}}{100 \text{ update dt}} \times 100\%$	Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum	Bagian Hukum
	Kajian dan laporan tentang permasalahan terkait Peraturan Perundang-undangan.	$\frac{2 \text{ Lap kajian}}{2 \text{ Lap kajian}} \times 100\%$	Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum	Bagian Hukum

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Lebih dari 100 %	SANGAT BAIK
2.	76 % s/d 100 %	BAIK
2.	55 % s/d 75 %	CUKUP
3.	Kurang dari 55 %	KURANG

Adapun rincian pengukuran kinerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.	Peraturan Daerah yang dihasilkan.	90 %	80 %	88 % (Baik)
		Peraturan Bupati yang dihasilkan.	90 %	90 %	100% (Baik)
		Keputusan Bupati yang dihasilkan.	100 %	115 %	120% (Sangat Baik)
2	Meningkatnya program bantuan hukum yang berkaitan dengan Pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi pemerintah Kabupaten Jember dalam hubungan kedinasan dan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin serta kelompok rentan.	3 Permasalahan Hukum terkait hubungan kedinasan yang dapat diselesaikan.	100 %	100 %	100% (Baik)
		Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin serta Kelompok rentan.	100 %	100 %	100% (Baik)
3	Meningkatnya pemberian informasi hukum kepada masyarakat.	Lomba keluarga Sadar Hukum.	80 %	0 %	0 % (Kurang)
		Penyuluhan Hukum.	80%	60 %	75 % (Cukup)
		Sosialisasi Produk Hukum.	80 %	0 %	0 % (Kurang)
		Pengadaan Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah.	90 %	90 %	100% (Baik)
		Pengelolaan Sistem Informasi JDIH.	80 %	80 %	100% (Baik)
		Kajian dan laporan tentang permasalahan terkait Peraturan Perundang-undangan.	80 %	80 %	100% (Baik)

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember Tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember Tahun 2021, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 12 (dua belas) indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

I. Tujuan 1

Sasaran 1

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				
			Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.	Peraturan Daerah yang dihasilkan.	50 %	90 %	20 %	60 %	88 %
		Peraturan Bupati yang dihasilkan.	100 %	70 %	100 %	100 %	100 %
		Keputusan Bupati yang dihasilkan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.	Peraturan Daerah yang dihasilkan.	90 %	88 %	88 %
		Peraturan Bupati yang dihasilkan.	90 %	90 %	100 %
		Keputusan Bupati yang dihasilkan.	100 %	100 %	100 %

Data capaian realisasi kinerja tahun 2021 dilihat dari jumlah nomor register yang telah tercatat dengan jumlah rincian 5 Peraturan Daerah, 138 Peraturan Bupati dan 661 Keputusan Bupati.

Adanya kurangnya capaian Peraturan Daerah diakibatkan adanya kendala pada OPD pengusul yang belum sanggup memenuhi persyaratan dan beberapa usulan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dalam diproses di Biro Hukum Provinsi Jawa Timur sampai dengan lewat akhir tahun anggaran 2021 dan akan segera diselesaikan pada tahun 2022.



Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2021	REALISASI NASIONAL	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya Produk Hukum Daerah sebagai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.	Peraturan Daerah yang dihasilkan.	88 %	-	-
		Peraturan Bupati yang dihasilkan.	90 %	-	-
		Keputusan Bupati yang dihasilkan.	100 %	-	-

*Sumber Data: * data realisasi nasional tidak tersedia*

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar **98 %**, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah ~~sangat berhasil/ berhasil/ kurang/cukup~~.

Salah satu penunjang keberhasilan dari sasaran strategis Meningkatkan Produk Hukum Daerah Sebagai Dasar Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan ditunjang oleh banyaknya usulan penetapan aturan baik melalui Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai salah satu dasar kebijakan yang dibuat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang menunjang visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam mengejar kemajuan dibidang ekonomi, pendidikan dan pembangunan di Kabupaten Jember.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 1** terdiri dari 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Program: Program Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasai Hukum

Sub Kegiatan: Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah.

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Anggaran	517.450.000	385.984.900	74,59%
Keluaran/Output	: Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati yang telah ditetapkan.	10 Peraturan Daerah 75 Peraturan Bupati 500 Keputusan Bupati	8 Peraturan Daerah 138 Peraturan Bupati 661 Keputusan Bupati	88% 100% 100%
Penjelasan	: pada tahun 2021, bagian hukum lebih banyak mendapatkan usulan permohonan penetapan dan pengundangan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang dikarenakan perubahan Perbup KSOTK terkait Reformasi Birokrasi pada akhir tahun 2021 serta beberapa SK Anjab ABK yang ikut menyesuaikan KSOTK terbaru dan SK lain yang terkait tentang percepatan penanganan Covid 19 serta Vaksinasi di tiap Kecamatan sampai dengan Kelurahan. Adanya kendala dalam Peraturan Daerah yang kurang dari target diakibatkan belum siapnya OPD pengusul rancangan Peraturan Daerah dalam melengkapi kelengkapan usulan Peraturan Daerah seperti Naskah Akademik yang belum ada serta kurang prioritasnya usulan Perda ditinjau dari program prioritas Bupati Jember dalam RPJMD. Serta terkendala dalam proses fasilitasi Raperda di Biro Hukum Provinsi Jawa Timur yang bertepatan dengan banyaknya usulan fasilitasi dari Kabupaten/kota se Jawa Timur terkait Reformasi Birokrasi yang saat itu menjadi prioritas utama oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, menjadikan 4 usulan Raperda untuk fasilitasi dari Kabupaten Jember yang ditunda dan dilanjutkan pada tahun 2022.			

II. Tujuan 1

Sasaran 2

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				
			Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya program bantuan hukum yang berkaitan dengan Pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi pemerintah Kabupaten Jember dalam hubungan kedinasan dan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin serta kelompok rentan.	Tercapainya Permasalahan Hukum terkait hubungan kedinasan yang dapat diselesaikan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Tercapainya Jumlah Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin serta Kelompok rentan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber Data: Data dari Lembaga Bantuan Hukum/Organisasi Bantuan Hukum.

Masih banyaknya permohonan Bantuan Hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum / Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi yang telah bersinergi dengan Pemerintah Daerah membuat kegiatan Bantuan Hukum masih tetap dicapaian 100% sampai dengan akhir Tahun 2021.

Dengan adanya kegiatan ini, merupakan salah satu bentuk hadirnya Pemerintah untuk membantu Permasalahan Hukum bagi Masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan dan Haknya.



Keterangan Foto : Penyerahan Bantuan Hukum Maskin secara simbolis oleh Bupati Jember kepada Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Th 2021.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya program bantuan hukum yang berkaitan dengan Pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi pemerintah Kabupaten Jember dalam hubungan kedinasan dan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin serta kelompok rentan.	Tercapainya Permasalahan Hukum terkait hubungan kedinasan yang dapat diselesaikan.	100 %	100 %	100 %
		Tercapainya Jumlah Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin serta Kelompok rentan.	100 %	100 %	100 %

Sumber Data: Organisasi Bantuan Hukum Jember

Dilihat dari masih banyaknya jumlah permohonan Bantuan Hukum yang diterima oleh Organisasi Bantuan Hukum Jember, diharapkan kegiatan ini masih terus ditingkatkan baik dalam segi kerjasama antar lembaga Bantuan Hukum serta jumlah anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai pendongkrak kapasitas dari jumlah kuota Bantuan Hukum yang dapat dilayani.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2021	REALISASI NASIONAL	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya program bantuan hukum yang berkaitan dengan Pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi pemerintah Kabupaten Jember dalam hubungan kedinasan dan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin serta kelompok rentan.	Tercapainya Jumlah Permasalahan Hukum dan Bantuan Hukum yang telah terselesaikan.	100 %	-	-
		Tercapainya Jumlah Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin serta Kelompok rentan.	100 %	-	-

Sumber Data: data realisasi nasional

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar **100 %**, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **sangat berhasil / berhasil/ kurang/cukup**.

Sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Organisasi Bantuan hukum masih sangat dibutuhkan agar Bagian Hukum selaku pemangku tupoksi dari pemberi bantuan hukum yang dimiliki Pemerintah Daerah tetap dapat memberikan pelayanan dan pendampingan yang sangat butuhkan bagi Masyarakat Miskin dalam memperoleh keadilan dan haknya terutama yang terkendala dari segi keuangan seperti membayar biaya-biaya perkara, menyewa pengacara, dan lain-lain yang berhubungan dengan jalannya persidangan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 2** terdiri dari 1 (jumlah) program dan 1 (jumlah) kegiatan dan 1 (jumlah) sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasai Hukum
 Sub Kegiatan: Fasilitasi Bantuan Hukum

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Anggaran	1.318.501.000	1.286.604.100	97,58%
Keluaran/Output	: Tercapainya Jumlah Permasalahan Hukum dan Bantuan Hukum yang telah terselesaikan.	5 permasalahan hukum	5 permasalahan hukum	100%
		100 Pendampingan	100 Pendampingan	100%
Penjelasan	: 100 perkara bantuan hukum masyarakat miskin terbagi dalam 5 Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi pada Kementerian Hukum dan HAM. Dimana masing-masing bantuan dialokasikan sebesar Rp. 5.000.000,- Sedangkan untuk 5 permasalahan hukum yang dimaksud digunakan untuk permasalahan hukum yang dihadapi pemerintah Kabupaten Jember dalam hubungan kedinasan.			

III. Tujuan 1

Sasaran 3

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				
			Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya pemberian informasi hukum kepada masyarakat.	Tercapainya keikutsertaan Lomba keluarga Sadar Hukum.	100 %	100 %	100 %	60 %	-
		Tercapainya Jumlah Penyuluhan Hukum.	100 %	100 %	100 %	75 %	75 %
		Tercapainya Jumlah Sosialisasi Produk Hukum.	100 %	100 %	100 %	-	-
		Tercapainya Jumlah Pengadaan Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Tercapainya update Pengelolaan Sistem Informasi JDIH.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Kajian dan laporan tentang permasalahan terkait Peraturan Perundang-undangan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber Data: JDIH, Laporan Kajian, Laporan hasil kegiatan.

Adanya beberapa sub kegiatan yang tidak dapat berjalan dan dilaksanakan secara maksimal karena diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang masih berjalan demi menekan penyebaran virus Covid 19 yang juga berakibat pada beberapa anggaran kegiatan dialihkan untuk kegiatan yang dirasa lebih prioritas dibutuhkan masyarakat terdampak kebijakan tersebut antara lain berupa bantuan sosial bagi masyarakat dan perlengkapan medis bagi tenaga kesehatan.



Keterangan Foto : Kegiatan Penyuluhan Hukum yang sempat dilaksanakan selama masa pandemi Covid 19.

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pemberian informasi hukum kepada masyarakat.	Tercapainya keikutsertaan Lomba keluarga Sadar Hukum.	50 %	50 %	50 %
		Tercapainya Jumlah Penyuluhan Hukum.	75 %	75 %	75 %
		Tercapainya Jumlah Sosialisasi Produk Hukum.	-	-	-
		Tercapainya Jumlah Pengadaan Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah.	100 %	100 %	100 %
		Tercapainya update Pengelolaan Sistem Informasi JDIH.	100 %	100 %	100 %
		Kajian dan laporan tentang permasalahan terkait Peraturan Perundang-undangan.	100 %	100 %	100 %

Sumber Data: JDIH, Laporan Kajian, Laporan hasil kegiatan.

Untuk kegiatan lomba keluarga sadar hukum pada tahun 2021 direncanakan masih berjalan akan tetapi sebatas pelatihan persiapan lomba dikarenakan awal tahun 2021 jadwal lomba sadar hukum dari KemenkumHam Regional Jember belum dikeluarkan dengan alasan masih melihat perkembangan situasi kondisi daerah terhadap pandemi covid 19, sama halnya dengan Penyuluhan hukum hanya dapat dilaksanakan sebelum kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat diberlakukan.

Sedangkan untuk kegiatan sosialisasi dari awal tahun sudah diprediksi untuk tidak dilaksanakan karena melihat situasi Kabupaten Jember yang statusnya belum masuk dalam zona hijau dan dirasa belum stabilnya kegiatan dimasyarakat selama masa pandemi covid 19.

Tabel 4.0
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2021	REALISASI NASIONAL	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pemberian informasi hukum kepada masyarakat.	Tercapainya keikutsertaan Lomba keluarga Sadar Hukum.	50 %	-	-
		Tercapainya Jumlah Penyuluhan Hukum.	75 %	-	-
		Tercapainya Jumlah Sosialisasi Produk Hukum.	-	-	-
		Tercapainya Jumlah Pengadaan Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah.	100 %	-	-
		Tercapainya update Pengelolaan Sistem Informasi JDIH.	100 %	-	-
		Kajian dan laporan tentang permasalahan terkait Peraturan Perundang-undangan.	100 %	-	-

Sumber Data: data realisasi nasional

Dari tabel diatas rata-rata capaian sasaran sebesar **76 %**, sehingga pencapaian sasaran tersebut adalah **sangat berhasil/ berhasil/ kurang/cukup**.

Dilihat dari capaian sasaran strategi meningkatnya pemberian informasi hukum kepada masyarakat masih dapat dikatakan berhasil walaupun tidak tercapainya 2 kegiatan yang dapat dilaksanakan akibat masih belum stabilnya situasi pandemi di Kabupaten Jember. Dengan hal tersebut Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember berinisiatif lebih meningkatkan kegiatan yang masih berperan banyak dalam indikator pemberian informasi hukum kepada masyarakat melalui terupdatenya sistem informasi hukum di website JDIH serta beberapa Kajian dan Laporan tentang permasalahan peraturan perundang-undangan serta ikut membantu mengalokasikan anggaran kegiatan yang tidak dapat terlaksana ke kegiatan-kegiatan sosial prioritas kebutuhan masyarakat terdampak pandemi covid 19.

Diharapkan pada Tahun 2022 Kabupaten Jember cepat melewati masa pandemi covid 19 agar Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dapat lebih maksimal dalam melaksanakan kegiatan yang tertunda pada tahun 2021.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 3** terdiri dari 1 (jumlah) program dan 1 (jumlah) kegiatan dan 1 (jumlah) sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Program Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Sub Kegiatan: Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Anggaran	116.750.000	96.450.000	82,61
Keluaran/Output	: tercapainya Jumlah pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, lomba sadar hukum serta Jumlah produk hukum daerah yang telah terupload diwebsite JDIH Kabupaten Jember	6 kali pelatihan persiapan Lomba keluarga Sadar Hukum.	3 kali pelatihan persiapan Lomba keluarga Sadar Hukum.	50 %
		6 Penyuluhan Hukum.	3 Penyuluhan Hukum.	50%
		Tidak dapat dilaksanakan Sosialisasi Produk Hukum.	Tidak dapat dilaksanakan Sosialisasi Produk Hukum.	0%
		240 Pengadaan Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah.	240 Pengadaan Buku Lembaran Daerah dan Berita Daerah.	100 %
		100 update Produk Hukum diwebsite JDIH.	100 update Produk Hukum diwebsite JDIH.	100 %
		2 Laporan kajian Peraturan Perundang-undangan.	2 Laporan kajian Peraturan Perundang-undangan.	100 %
Penjelasan	: 2 laporan kajian Peraturan Perundang-undangan yang merupakan tindak lanjut sinkronisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Produk Hukum Kabupaten Jember hasil kerjasama dengan LP2M Universitas Jember.			

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember tahun 2021 adalah sebesar Rp. 3.308.014.000,- yang terdiri dari:

- a. Belanja Operasi Rp. 2.876.951.700,-
 - Belanja Pegawai Rp. 119.500.000,-
 - Belanja Barang/Jasa Rp. 2.757.451.700,-
- b. Belanja Modal Rp. 431.062.300,-
 - Belanja Modal Rp. 431.062.300,-

Proporsi Anggaran pada tahun 2021, Belanja Pegawai sebesar 97,31%, Belanja Barang/Jasa sebesar 89,01% dan Belanja Modal sebesar 96,80 %.

2. Alokasi Anggaran Belanja Per Program/Kegiatan

Keseluruhan anggaran belanja langsung per program/kegiatan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember tahun 2021 terdiri dari :

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.			
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	10.672.000	10.128.000	94,90%
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	10.672.000	6.548000	61,36%
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.	10.672.000	5.573.000	52,22%
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.	10.672.000	10.196.000	95,54%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.			
1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.	604.840.200	506.568.265	83,75%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.			
1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (BM).	431.062.300	417.274.400	96,80%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	22.814.500	22.284.031	97,67%
3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	253.908.000	240.434.111	94,69%
II	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.			
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.			
1.	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah.	517.450.000	385.984.900	74,59%
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum.	1.318.501.000	1.286.604.100	97,58%
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi.	116.750.000	96.450.000	82,61%
	TOTAL	3.308.014.000	2.988.044.807	90,33%

3. Alokasi Belanja Per Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir:

Berdasarkan tabel RKT 2021, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung pada Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran sebesar Rp. 1.952.701.000,- pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum terbagi dalam 3 (tiga) Sasaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. Untuk Sasaran Strategis I: Meningkatnya Produk Hukum Daerah Sebagai Dasar Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Didukung oleh :

Sub Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Daerah Dengan Anggaran sebesar Rp.517.450.000,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 1.952.701.000,- yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 26,5 % dari keseluruhan belanja langsung Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember.

- b. Untuk Sasaran Strategis II: Meningkatnya Pendampingan Dan Penyelesaian Permasalahan Hukum Bagi PNS Dalam Hubungan Kedinasan Dan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

didukung oleh :

Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Dengan Anggaran Rp. 1.318.501.000,-

Keseluruhan Anggaran Program sejumlah Rp. 1.952.701.000,- yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 67,5 % dari keseluruhan belanja langsung Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember.

- c. Untuk Sasaran Strategis III: Meningkatnya pemberian informasi hukum kepada masyarakat.

didukung oleh :

Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Dengan Anggaran Rp. 116.750.000,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 1.952.701.000,- yang dialokasikan untuk sasaran III adalah sebesar 6 % dari keseluruhan belanja langsung Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember.

BAB IV PENUTUP

Dalam tahun 2021 Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember tahun 2016-2021.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Baik /Kurang** karena dari 3 (tiga) indikator sasaran pencapaiannya sebanyak 2 (dua) indikator dalam kategori baik, dan 1 (satu) indikator dalam kategori cukup.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 2.988.044.807,- (90,33 %) meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp. 0 (0%) dan Belanja langsung sebesar Rp. 2.988.044.807,- (90,33 %),

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Beberapa kegiatan yang terhambat pelaksanaannya ataupun yang tidak dapat dilaksanakan disebabkan situasi kondisi pandemi covid 19 yang masih belum terkendali.
2. Kurangnya personil ASN serta ditambah adanya personil yang telah Purna tugas mengakibatkan sedikit terkendalanya sistem kerja dengan dampak ASN yang ada harus mengambil alih tugas/menambah beban kerja dari personil di Bagian Hukum Jember.
3. Tempat kerja yang telah penuh berkas dikarenakan belum memiliki tempat khusus arsip aktif menambah kinerja Bagian Hukum kurang maksimal, terutama pada bagian dokumentasi produk hukum daerah.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya antara lain melalui :

1. Diharapkan pada tahun 2022 masa pandemi covid 19 telah terkendali agar kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat seperti Sosialisasi dan Penyuluhan dapat dilaksanakan serta menambah realisasi anggaran yang akan terserap.
2. Penambahan personil yang mumpuni juga sangat diharapkan Bagian Hukum Jember demi memperingan beban kerja yang berdampak hasil kerja dapat terarah dan maksimal.
3. Tempat penyimpanan arsip yang layak diharapkan dapat sebagai solusi dari penataan dokumen produk hukum secara benar dan sesuai dengan standart penataan kearsipan.

Demikian Laporan Kinerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2021 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2022.